

## BAB V

### Kesimpulan dan Rekomendasi

#### 5.1. Kesimpulan

Jepang tumbuh dari bayang-bayang Amerika Serikat pasca-Perang Dunia ke-2, dengan sistem kebijakan yang penuh dengan disiplin. Kepentingan Amerika Serikat untuk menghadirkan kekuatan proksi di kawasan Asia Timur ini kemudian mewariskan sebuah kultur birokrasi yang sangat tegas dan kental dengan nuansa intervensi dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Kultur ini juga merasuk dalam setiap kebijakan ekonomi negara yang diidentifikasi dari munculnya *keiretsu* sebagai jaringan kekeluargaan dalam sistem bisnis Jepang. Jaringan ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah dengan berbagai regulasi yang mengakselerasikan pertumbuhan sektor bisnis *keiretsu* terhadap sistem bisnis nasional.

Namun sistem ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan yang evolusioner. Jepang yang dikenal sebagai negara dengan perekonomian terkuat kedua di dunia, memiliki jaringan pasar yang sangat besar di Amerika Serikat yang sekaligus mitra dagangnya yang utama. Jepang juga menemukan pola efisiensi dalam fase pertumbuhan ekonominya yang mendayagunakan aspek efisiensi produksi. Pola ini menghasilkan industrialisasi di negara-negara Asia Timur dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan di kawasan ini. Dalam beberapa studi, pola ini kemudian dikenal dengan *the 'flying geese economy'* atau *the locomotive economy*. Negara dan pebisnis dalam skala yang besar menjadi lokomotif yang siap menggerakkan sektor-sektor bisnis yang mikro dan kecil, baik dalam hal pendanaan ataupun transfer teknologi, sebagai gerbong yang siap dijalankan oleh lokomotif, khususnya di Asia Timur. Seiring dengan keterkaitan Jepang terhadap perekonomian dunia ini, Jepang kemudian mendapatkan tekanan secara unilateral dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat untuk menandatangani *Plaza Accord Agreement* dan *Louvre Accord Agreement* yang keduanya menuntut Jepang untuk merevaluasi mata

uangnya agar kehadiran produk Jepang di dunia tidak memberikan dampak negatif bagi produk-produk negara lainnya. Inilah momentum perubahan substansial dalam sejarah perekonomian Jepang menuju perekonomian yang berbasis pada sektor non-riil, yakni keuangan.

Studi ini telah memetakan perubahan secara terukur dalam setiap perubahan yang terdapat dalam pembagian fase-fase internasionalisasi ekonomi Jepang. Dimulai dari krisis meningkatnya suku bunga yang menyebabkan terjadinya penggelembungan nilai aset di sektor perumahan pada awal 1990-an, Jepang kemudian menanggapi secara sangat reaktif dengan mengurangi suku bunga hingga mendekati angka nol. Volatilitas kawasan dan kerentanan kebijakan ekonomi Jepang inilah yang kemudian menjadikan Jepang mulai berkonsentrasi untuk masuk ke dalam sektor keuangan internasional.

Krisis Asia 1997 menjadi momentum yang paling mencolok, ditandai dengan besarnya modal jangka pendek yang masuk ke perekonomian Jepang, dan juga Asia Timur lainnya. Fenomena ini tidak disambut dengan kebijakan yang mengetatkan arus peredaran modal di kawasan, namun justru direspon dengan pelonggaran dalam mobilitas modal. Faktor ini ternyata menjatuhkan perekonomian negara-negara di Asia Timur. Dari sinilah, CMI digagas untuk menghadirkan stabilitas modal dan kebijakan finansial yang informatif diantara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN+3. Jepang, sebagai negara dengan kapabilitas perekonomian terbaik di kawasan, menjadi pendorong utama terciptanya tingkat kerjasama yang lebih tinggi bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya.

Ketidakpastian yang disebabkan oleh mobilitas kapital yang tinggi, kegagalan aset-aset Jepang dalam bentuk investasi portofolio yang ditanamkan di kawasan Amerika dan Eropa, serta meningkatnya kapasitas konsumsi Asia Timur, menjadikan CMI sangat menopang kepentingan nasional Jepang. Terlebih, kebijakan disinflasi yang tidak diantisipasi dengan cermat dengan menerapkan kebijakan pengaman (*precautionary measure*) terhadap kemungkinan terhentinya

sektor riil karena nilai deflasi yang tidak menguntungkan, membuat Jepang harus meminimalisir segala resiko keuangan yang datang dari luar.

Fenomena yang muncul pasca-krisis finansial global 2008 juga menjadi titik balik yang sangat penting dalam kontribusinya terhadap dinamika politik dan ekonomi di Asia Timur. Secara spesifik, faktor perubahan pola hubungan Jepang dan China yang telah dimulai dari tahun 2005, menjadikan signifikansi perlunya penguatan kawasan menjadi hal yang tak terhindarkan. Jika dalam dekade sebelumnya, wacana kuat yang berkembang dalam perdebatan politik di kawasan ini adalah siapakah kekuatan politik yang akan mengambil bagian sebagai “pemimpin” kawasan Asia Timur, kini, dengan terbukanya kerjasama antara Jepang dan China menjadikan konstelasi diwarnai dengan cara yang berbeda. Jepang, khususnya pasca krisis finansial global 2008, telah memiliki ketergantungan pasar dan produksi yang cukup tinggi terhadap China. Dari sini, disinyalir, perdebatan mengenai siapa yang akan memimpin Asia Timur akan mereda dan diwarnai dengan wacana peningkatan kerjasama diantara kedua negara.

Fakta-fakta inilah yang memberikan kepastian terhadap perlunya penguatan kerjasama keuangan regional Asia Timur, Chiang Mai Initiative untuk direalisasikan. Disamping memberikan insentif dalam bentuk cadangan devisa, mekanisme yang dapat diimplementasikan dalam CMI ini cenderung lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman dari IMF. Faktor penentu likuiditas anggaran hanya bergantung kepada komitmen politik diantara pihak-pihak yang bersepakat dalam mekanisme *Bilateral Swap Arrangement*. Hingga akhir tahun 2009, kerjasama CMI akan ditingkatkan dari yang sifatnya bilateral menjadi multilateral. Ini artinya, Asia Timur akan benar-benar memiliki lembaga keuangan independen yang menjamin dalam bidang moneter.

Penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dengan memberikan argumentasi yang bertumpu pada perspektif kepentingan nasional Jepang. Pertama, dalam bab 2 telah dijelaskan, bagaimana interaksi antara Jepang

dilakukan terhadap Asia Timur. interaksi inilah yang melandasi interdependensi yang bersifat strategis oleh Jepang. dengan interdependensi ini, Jepang, bersama-sama dengan negara-negara di Asia Timur masing-masing memiliki kepentingan nasional yang harus dipenuhi dalam membangun basis perekonomiannya di kawasan. Aspek inilah yang membawa pada kerangka pemikiran kedua, yakni mengenai institusionalisme dalam konteks pemikiran Keohane.

Dalam kerangka ini, institusionalisme tidak dilandasi oleh adanya kepentingan dan tujuan bersama. Sebagai misal, kepentingan nasional Jepang dan negara-negara di Asia Timur berbeda satu dan yang lainnya. Jepang sangat bergantung terhadap Asia Timur dalam konteks stabilitas nilai tukar dan likuiditas dalam membangun perekonomian nasionalnya yang telah masuk dalam pergolakan pasar keuangan internasional. Di sisi lain, negara-negara di Asia Timur akan lebih memerlukan besaran dana cadangan devisa yang dialokasikan oleh negara-negara di Asia Timur, khususnya Jepang, China, Korea Selatan, dan negara-negara inudstri baru agar dapat mengurangi ketergantungan negara ini terhadap masuknya IMF sebagai langkah yang kurang tepat sebagaimana pengalaman Krisis Asia 1997 yang menjadikan beberapa negara justru terpuruk dari krisis.

Dari dua aspek di atas, maka proses pengambilan kebijakan luar negeri yang dihasilkan oleh Jepang tidak semata-mata merupakan agregat antara fenomena yang terdapat dari dalam dan luar, namun juga melibatkan aspek kepentingan negara (birokrat dan politisi) dalam turut serta mengawal perekonomian nasional. Penulis beranggapan, fenomena ini tidak terlepas dari kultur kebijakan Jepang yang sangat kental dengan nuansa intervensionis terhadap segala bentuk kebijakan yang beresiko terhadap diterimanya kerugian. Sebagai misal, masih banyak aspek-aspek keikutsertaan negara dalam mengakselerasikan pertumbuhan dalam beberapa sektor bisnis dengan praktek *amakudari* yang dilakukan oleh mantan birokrat Jepang.

## 5.2. Rekomendasi

Jepang dalam perspektif ini tidak dapat menghindar dari kemungkinan besarnya resiko dalam volatilitas keuangan internasional. Padahal diketahui bahwa investasi portofolio Jepang berjumlah sangat besar, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Jika berbicara mengenai stabilitas nilai tukar, tentunya aspek yang harus pertama kali dibenahi adalah dihidupkannya kembali sektor riil bagi Jepang. Krisis Finansial Global 2008 membuktikan bahwa sebagian besar dari ASEAN telah lolos dari jeratan krisis dan ini artinya, kawasan ini memiliki stabilitas tingkat konsumsi yang baik. Dalam aspek permintaan, maka dengan persebaran tingkat konsumsi yang stabil di kawasan, Jepang tidak perlu khawatir dengan menurunnya performa sektor riil dalam negeri Jepang karena ASEAN dan negara-negara Asia lainnya yang bertahan dalam pengalaman krisis masih berpotensi menjadi pasar yang kuat.

Kedua, dalam konteks kebijakan finansial, kerjasama CMI sebenarnya telah memberikan insentif terhadap dikurangnya penggunaan peraturan dalam mekanisme keuangan internasional yang dipromosikan melalui lembaga-lembaga keuangan internasional. Jika dalam tataran institusional, CMI dapat menjadi pemisah (*decouple*) dari sistem pengawasan ekonomi internasional, maka dalam tataran substansi, Asia Timur seyogianya mengurangi transaksi dalam dollar AS karena memiliki resiko volatilitas yang lebih tinggi, khususnya jika digunakan untuk melakukan transaksi intra-kawasan. Namun demikian, dana cadangan yang dianggarkan dalam bentuk BSA tetap didenominasikan dalam bentuk dollar AS, mengingat mekanisme ini dipergunakan dengan orientasi likuiditas nasional dan kaitannya untuk memberikan jaring pengaman bagi keterkaitan dengan perekonomian global. Dengan ini, sedikit demi sedikit dapat mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS yang selama ini dipersepsikan sebagai mata uang utama (*anchor currency*) menjadi perekonomian yang berbasis kepada kapasitas kawasan.

Dalam kerangka kebijakan moneter, Jepang harus segera merumuskan langkah yang cepat dalam upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap munculnya krisis ekonomi. Kebijakan disinflasi, sebagai contoh, pada akhirnya memberikan kontribusi yang kurang baik bagi pergerakan sektor riil. Di sinilah, Jepang harus memiliki sistem evaluasi terhadap kebijakan ekonomi yang mereka tempuh agar menghindarkan negara dari kemungkinan resesi.

Ketiga, mengingat belum adanya pernyataan sikap dari Jepang ataupun China terhadap kerjasama yang terjalin diantara keduanya, negara-negara ini seharusnya memberikan pernyataan politik yang mengandung komitmen untuk bekerjasama dalam tingkat yang lebih tinggi. Pernyataan ini akan memberikan kepercayaan diri yang tinggi di kawasan, baik bagi negara-negara anggota ASEAN+3 ataupun negara di luar kawasan yang memiliki kepentingan ekonomi di kawasan. Pernyataan ini akan menjadikan kerjasama diantara keduanya dengan negara-negara ASEAN+3 lainnya menjadi lebih konkret. Peristiwa ini akan menjadi momentum bagi Asia Timur untuk membentuk kerjasama yang lebih strategis, seiring dengan semakin kuatnya kapasitas pemisahan (*decoupling effect*) dari Asia Timur terhadap perekonomian global yang lebih fluktuatif. Di tengah kapasitas ekonomi China yang semakin menguat, Jepang dapat menjadikan kerjasama diantara mereka untuk perlahan-lahan memperkuat mekanisme pengawasan keuangan internal kawasan, sehingga keinginan Jepang untuk membangun lembaga keuangan regional yang independen sebagaimana gagasannya tentang AMF, setidaknya terlaksana sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan dengan IMF ketika peminjaman dalam mekanisme BSA telah lebih dari 20 persen.

Dalam rangka untuk memicu stimulus yang meningkatkan distribusi pendapatan dan tingkat konsumsi di kawasan yang pada akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi, Jepang juga masih perlu menyalurkan berbagai dana bantuan luar negeri untuk pembangunan di kawasan ASEAN yang masih mengalami ketertinggalan, namun menyimpan berbagai potensi pasar yang sangat

besar. Dana ini digunakan untuk menjadi akselerator pertumbuhan di kawasan yang praktiknya akan memberikan insentif terhadap konsumsi publik di ASEAN.

